

# **POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL, MANUSIA BERKUALITAS, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, MERUPAKAN TIGA MATA RANTAI YANG TAK TERPUTUSKAN**

Oleh:

**H. MALIK ZUHRI**

## **ABSTRAK**

*Politik Pendidikan Nasional, manusia berkualitas, dan kesejahteraan sosial merupakan memiliki hubungan yang saling berkaitan, ibarat tiga mata rantai yang tak terputuskan. Politik Pendidikan Nasional mengupayakan bagaimana mewujudkan manusia yang berkualitas, dengan adanya manusia yang berkualitas maka terwujudlah kesejahteraan sosial, ketika kesejahteraan sosial terwujud maka upaya untuk mewujudkan Pendidikan Nasional yang berkualitas sangat mudah dicapai dan dengan hasil yang berkualitas*

Kata Kunci:

*Kebijakan Pemerintah, Pendidikan, Manusia Berkualitas*

## **A. Pendahuluan**

Kajian tentang pendidikan merupakan kajian yang tidak pernah selesai, senantiasa menjadi menjadi diskusi yang hangat bagi seluruh kalangan, terlebih bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan. Ini terjadi karena isu tentang pendidikan terus mengalami dinamisasi, terus terjadi perubahan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Pendidikan juga dijadikan sebagai tumpuhan sekaligus arah perkembangan manusia

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, negara sudah berupaya memperbaiki sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya adalah Pendidikan Islam, namun sampai saat ini, keberhasilan itu belum nampak, justru data yang dirilis oleh Pearson Education (2014) cukup mencengangkan.

“Indonesia adalah yang paling rendah (nomor 40) dari ranking 40 negara di dunia”. Yang menarik adalah hasil ranking berdasarkan Education Index ini terdapat empat negara di Asia yang menempati posisi nomor satu sampai empat menggeser Finlandia ke posisi nomor urut lima yang pada tahun 2012 berada di posisi nomor urut satu. Keempat negara Asia dengan sistem pendidikan terbaik di dunia pada tahun 2014 adalah: (1) Korea Selatan, (2) Jepang, (3) Singapura, dan (4) Hongkong. Ranking berikut adalah Finlandia (ranking 5), Inggris (6), Kanada (7), Belanda (8), Jerman (12), USA (14), Australia (15), Belgia (18), Prancis (23), Thailand (35), Brazil (38), Meksiko (39), dan Indonesia (40).

Politik pendidikan nasional, manusia berkualitas, dan kesejahteraan sosial merupakan tiga mata rantai yang tak terputuskan. Tiga komponen ini saling berkaitan, Politik Pendidikan Nasional mengupayakan bagaimana mewujudkan manusia yang berkualitas, dengan adanya manusia yang berkualitas maka terwujudlah kesejahteraan sosial, ketika kesejahteraan sosial terwujud maka upaya untuk mewujudkan Pendidikan Nasional yang berkualitas sangat mudah dicapai dan dengan hasil pendidikan yang berkualitas.

Untuk lebih jelas dan detail penjelasan mengenai keterpautan antara Politik Pendidikan Nasional, manusia berkualitas dan kesejahteraan sosial, dalam makalah ini penulis sajikan hakekat Politik Pendidikan Nasional, Pendidikan Nasional membentuk manusia berkualitas, dan manusia berkualitas sebagai instrumen kesejahteraan sosial

## **B. Pembahasan**

### **1. Hakekat Politik Pendidikan Nasional**

Menurut Muhammad Daud Ali, Politik itu berasal dari Bahasa Latin *politicus* atau Bahasa Yunani *politicos* yang artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau dengan warga kota.<sup>1</sup>

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian politik ditulis sebagai berikut;

---

<sup>1</sup> Ki Supriyoko, et al, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta; Pustaka Fahima, 2007), hal. 4

- a. *Pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintah, dasar-dasar pemerintahan, dan sebagainya;*
- b. *Segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya, tentang pemerintahan ataupun negara lain;*
- c. *Kebijakan, cara bertindak dalam di dalam menghadapi suatu masalah tertentu*<sup>2</sup>

Menurut Prof. DR. Ki Supriyoko dalam buku konfigurasi politik pendidikan Nasional, *"politik adalah suatu cara atau metode mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mencapai tujuan kelompok"*.<sup>3</sup>

Adapun pengertian pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas *"pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara"*<sup>4</sup>

Dalam pasal yang sama disebutkan juga bahwa *" pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman"*<sup>5</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik pendidikan nasional yang dimaksud adalah metode atau pendekatan yang berdasarakan Pancasila, UUD RI 1945 dan kebudayaan bangsa Indonesia untuk mempengaruhi pihak tertentu yang terkait dengan pengambilan kebijakan demi mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Pengertian tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Prof. DR. Ki Supriyoko dalam sajian kuliahnya *"Politik Pendidikan Nasional dalam kuliah ini dimaksudkan pendekatan atau metoda yang ditempuh pemerintah Republik*

---

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

<sup>3</sup> Ki Supriyoko, et al, *Konfigurasi ...*, hal. 4

<sup>4</sup> *UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokus Media, 2003) hal. 3

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 3

*Indonesia untuk mempengaruhi pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional”*

Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa Politik Pendidikan Nasional berorientasi pada

1. Bagaimana tujuan pendidikan nasional dapat dicapai
2. Bagaimana metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sebagainya
3. Sejauh mana pencapaian hasil pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter, dan sebagainya.

Politik Pendidikan merupakan formula, strategi, cara dan metode yang tepat dalam menjalankan roda pendidikan Indonesia. Tanpa adanya politik Pendidikan Nasional perjalanan pendidikan berjalan tanpa arah sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kesejahteraan sosial sangat berpengaruh terhadap Politik Pendidikan Indonesia. misalnya dengan tingginya perekonomian nasional, pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan strata.

rendahnya perekonomian bangsa Indonesia merupakan satu indikasi bahwa kesejahteraan sosial belum terwujud. hal ini memengaruhi kebijakan pemerintah tentang pendidikan, misalkan masalah alokasi anggaran pendidikan yang mestinya 20% dari APBN maupun APBD belum bisa terealisasikan. akibatnya pendidikan yang berkualitas belum dapat diakses oleh rakyat secara merata.

## **2. Pendidikan Nasional Membentuk Manusia Berkualitas**

Pemahaman mengenai konsep manusia berkualitas sangatlah beragam, dilihat dari perspektif apa yang digunakan untuk menilai manusia sehingga menyandang gelar berkualitas. Dalam perspektif Islam, manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki kemampuan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Kemampuan keagamaan yang ada berfungsi

sebagai landasan dalam segala aktifitas kesehariannya serta segala sesuatu yang dilakukannya didasarkan pada penyerahan diri kepada yang Maha Esa<sup>6</sup>

Secara umum manusia berkualitas adalah sosok individu yang mampu menghadapi tantangan global dalam persaingan pengetahuan dan teknologi. Tantangan tersebut berkaitan erat dengan persaingan di dunia usaha memasuki era pasar global, di mana persaingan yang ada bersifat global<sup>7</sup>

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan ” *SDM berkualitas adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab* ”

Menurut Elwin Tobing, ukuran yang menentukan kualitas manusia ada berbagai aspek yang dapat menjelaskan hal ini seperti aspek kesehatan, pendidikan, kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik.

Teori Nativis dan Empiris yang disatukan oleh Kerschenteiner dengan teori konvergensinya telah ikut membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang dapat dididik dan dapat mendidik sehingga terbentuk manusia yang berkualitas. Teori konvergensi mengatakan “*bahawa pertumbuhan dan perkembangan seseorang merupakan hasil perpaduan pengaruh yang berasal dari sumber, yaitu bakat atau pembawaan dan pendidikan*”<sup>8</sup>

Teori ini senada dengan pendapat Ibnu Maskaweh tentang karakter (1320 M/934 H), dalam hal ini dia mengemukakan dua pendapat ekstrim. *Pertama*, manusia secara alami adalah baik, dan berubah menjadi buruk karena faktor lingkungan. *Kedua*, manusia secara alami adalah buruk, dan bisa menjadi baik karena faktor lingkungan<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abuddin Natta, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 51

<sup>7</sup> Ki Supriyoko, et al, *Konfigurasi ...*, hal. 41-42

<sup>8</sup> Fauzan, *Konfigurasi.....*hal. 40

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 40

Dengan demikian Penulis memastikan bahwa manusia tidak berkembang dengan sendirinya. perkembangan manusia banyak tergantung pada lingkungannya, dan pendidikan merupakan lingkungan yang paling penting dan efektif dalam membentuk perkembangan manusia sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Dalam islam, penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu kewajiban. Dengan pendidikan manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup sehingga selaras dengan fitrahnya sebagaimana yang telah ditentukan kepadanya.

pendapat ini didukung oleh para penganut teori human *Human Capital*. Mereka berpendapat bahwa pendidikan merupakan investasi SDM yang memberi manfaat *moneter* dan *non-moneter*. manfaat *non-moneter* yaitu dengan diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat *moneter* yaitu manfaat ekonomis, berupa pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan dibawahnya<sup>10</sup>

Salah satu usaha konkrit untuk meningkatkan mutu kualitas manusia indoneia adalah melalui jalur pendidikan, karena pendidikan diyakini sebagai media yang paling ampuh dan efektif dalam membentuk manusia berkualitas dan taraf hidup suatu bangsa serta kualitas negara di mata internasional. demi tercapainya hal tersebut, sistem pendidikan nasional sangatlah menentukan, sehingga segala upaya harus dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan ke arah yang lebih baik.

Tokoh Pendiri nasional yakni Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah Pendidikan. Dan dalam rangka mencapai satu standar pendidikan yang layak, maka diperlukan satu formula, strategi, cara dan metode yang tepat dalam menjalankan roda pendidikan Indonesia. Di sinilah politik pendidikan nasional muncul sebagai sebuah keniscayaan. Tanpa adanya pemahaman mengenai politik

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 42

pendidikan nasional, pendidikan hampir seperti berjalan tanpa tahu arah dan tujuan.<sup>11</sup>

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan manusia berkualitas melalui jalur pendidikan dapat dijawab dalam tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang terumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (5). “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang” (UUD 1945 pasal 33 ayat 3). “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia” (UUD 1945 pasal 33 ayat 5). dan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama UU Sisdiknas 2003 pasal 3.

*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU SISDIKNAS (2003) Pasal 3)*

Selain itu, kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia, sedangkan dalam kenyataannya sulit untuk dibantah bahwa kualitas kegiatan atau proses pembelajaran tersebut sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor guru dalam mengimplementasikan jabatan/pekerjaan sebagai sebuah profesi. Guru dan/atau tenaga kependidikan yang terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran serta guru bimbingan dan konseling mengemban peran profesional yang sangat

---

<sup>11</sup> Falmersius L.Gaol, *Arti Penting Pendidikan Bagi Manusia (Membangun Pendidikan untuk Mewujudkan Manusia Indonesia berkualitas)*, (Jakarta: Swara Pendidikan, 2006), hal. 12.

penting dalam mempersiapkan calon pemimpin bangsa di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan, atau di lingkungan masyarakat. Dari tangan para guru tersebut sepanjang masa diharapkan selalu dihasilkan para lulusan sebagai calon pengganti pimpinan dalam rangka pergantian generasi yang tidak saja memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya masing-masing, tetapi juga sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional<sup>12</sup>.

dengan demikian penulis memastikan bahwa politik pendidikan nasional sangat menentukan terwujudnya manusia-manusia yang berkualitas. yakni terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif, inofatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

### **3. Manusia Berkualitas sebagai Instrumen Terwujudnya Kesejahteraan Sosial**

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan dan . Sosial dapat berarti kemasyarakatan <sup>13</sup> dari uraian ini dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi kemasyarakatan yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.

Kata sejahtera menurut KBBI (1988) berarti aman sentosa dan makmur.. kesejahteraan berarti kemanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya. kesejahteraan soial berarti keadaan sejahtera masyarakat. dengan demikian kesejahteraan sosial dalam makna *leksika* berarti suatu kondisi atau keadaan<sup>14</sup>,

---

<sup>12</sup> *Penjelasan Tentang UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (<http://www.depdiknas.go.id>)

<sup>13</sup> Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia* ( )

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Yakarta; Bumi Aksara, 1995), hal. 33

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memuat definisi kesejahteraan sosial sebagai berikut:

*Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.*

Bertedensi pada beberapa pengertian kesejahteraan sosial penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dikatakan sejahtera mana kala telah terpenuhi beberapa indikator di bawah :

1. Keadilan
2. Kedamaian
3. Kesehatan
4. Keamanan
5. Ketentraman lahir batin
6. Kemakmuran
7. Terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani
8. Menjujung tinggi hak asai serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Antonim dari kesejahteraan sosial adalah kemlaratan sosial, salah satu faktor picu utamanya adalah kebodohan, masyarakat yang tidak berkualitas. Menurut laporan *Human Development Report* tahun 2005, jumlah penduduk miskin terbesar di Asia Tenggara adalah di Indonesia, yaitu sebesar 38,7 juta orang diikuti oleh Vietnam (17,38), Kamboja (13,01), dan Myanmar (10,84). Tingginya tingkat kemiskinan Indonesia, membuat negara ini memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Dari data Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*), Indonesia menempati urutan 110,

lebih rendah dibanding negara di Asia Tenggara lainnya seperti Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (73), dan Filipina (84)<sup>15</sup>.

Menurut hemat penulis kesejahteraan sosial dapat terwujud bila masyarakat berkualitas, terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif, inofatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Bukan karena adanya sumber daya alam yang melimpah ruah.

Pendapat di atas senada dengan pendapat Suryoprato. Beliau menyatakan bahwa kemajuan suatu bangsa bukan ditentukan oleh berlimpahnya sumber daya alam, tetapi oleh kemampuan bangsa tersebut mempersiapkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya bisa dihasilkan apabila mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas pula, yang mana sejak awal telah diajarkan untuk selalu berpikir bebas dan mencari sesuatu yang baru. Sebab tidaklah mungkin bisa lahir sebuah karya asli yang *original* jika orang selalu dibatasi cara berpikirnya. Dengan itu semua maka dapatlah diharapkan suatu pemikiran yang kreatif. Pemikiran yang mampu menghasilkan sesuatu dari hal-hal yang sederhana dan ada disekitar kita. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas jika daripadanya dapat berpikir kreatif. Segala sesuatu karya besar bisa dihasilkan ketika kita mampu berpikir kreatif dan tidak pernah berhenti untuk menemukan inovasi. Tentu saja inovasi-inovasi yang dimaksud adalah untuk kesejahteraan manusia. itu sendiri<sup>16</sup>.

Pernyataan di atas tidak sekedar hanya opini atau teori belaka, melainkan telah terbukti dengan realitas yang terjadi di sebuah desa yang berada di kecamatan Temayang Bojonegoro Jawa Timur. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa tersebut sangat memprihatinkan, padahal sumber daya alam yang ada sangat melimpah. Di kawasan tersebut terdapat gunung batu Phosfat, yaitu bahan utama pembuatan pupuk Phosfat. Karena sumber daya manusia masyarakat desa ini tidak berkualitas, masyarakat tidak mampu mengolah SDA yang melimpah itu,

---

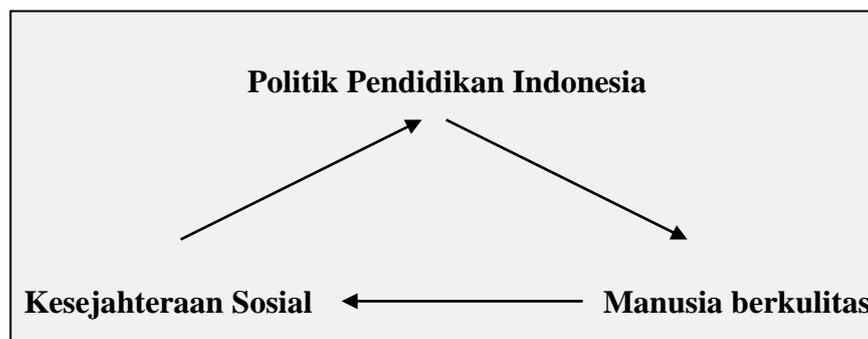
<sup>15</sup> Bachtiar Chamsyah, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Upaya Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan*, ( yang diakses pada 10 Nov 2007)

<sup>16</sup> Suryoprato, *Berpikir Sederhana, Berkarya Besar* (Kompas, Minggu, 10 Juni 2007)

sampai akhirnya batu gunung poshfat tersebut dibeli oleh pengusaha yang berasal dari Lamongan dengan harga sangat murah sekali, seharga dengan batu kapur lainnya. Padahal ketika sudah diolah menjadi Pupuk haraganya melambung tinggi sekitar Rp. 70.000,00 – 80.000,00 perdua puluh kilonya.

### C. Penutup

Bertedensi pada beberapa argumentasi dan teori yang telah disajikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Politik Pendidikan Nasional, manusia berkualitas, dan kesejahteraan sosial merupakan memiliki hubungan yang saling berkaitan, ibarat tiga mata rantai yang tak terputuskan. Politik Pendidikan Nasional mengupayakan bagaimana mewujudkan manusia yang berkualitas, dengan adanya manusia yang berkualitas maka terwujudlah kesejahteraan sosial, ketika kesejahteraan sosial terwujud maka upaya untuk mewujudkan Pendidikan Nasional yang berkualitas sangat mudah dicapai dan dengan hasil yang berkualitas.



Atau dengan kata lain dapat digambarkan, semakin tinggi kualitas Pendidikan Nasional maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia indonesia. semakin tinggi SDM Indonesia semakin tinggi kesejahteraan bangsa Indonesia. Semakin tinggi kesejahteraan bangsa Indonesia semakin mudah pemerintah mewujudkan Pendidikan Nasional yang berkuaitas

Demikian makalah ini penulis sajikan. Apabila ditemukan kesalahan baik dalam penyajian data atau pengetikan penuls mohon maaf yang sebesarnya. Kritik dan saran pembaca sangat kami nanti-nantikan untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Amiin

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Natta, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Bachtiar Chamsyah, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Upaya Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan* (<http://www.setneg.go.id/> yang diakses pada 10 Nov 2007).
- Effendi Gazali, *Kesejahteraan yang Terkandaskan*, Kompas, 3 Mei 2006.
- Falmersius L.Gaol, *Arti Penting Pendidikan Bagi Manusia (Membangun Pendidikan untuk Mewujudkan Manusia Indonesia berkualitas)*, Jakarta: Swara Pendidikan, 2006.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2001.
- Isjoni, *Saatnya Pendidikan Kita Bangkit*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ki Supriyoko, et al, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta; Pustaka Fahima, 2007.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokus Media, 2003.
- S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Sudarwan Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.